

Memahami Hakikat Kebijakan Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar

Doni Aizus Idris¹, Jon Hendri², Tuti Susanti³, Weni Hamdina⁴, Hafiz Hidayat⁵

¹⁻⁵Program Studi Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas Adzkia

Korespondensi penulis: doni.dozan@gmail.com¹

Abstract. Basic education is a critical phase in the formation of the foundation of knowledge, skills and values for each individual. The management policy of basic education units is central to ensuring equitable access and quality of education. This article explores the nature of basic education management policies, from the philosophical foundation to the implementation process. The library study method is used to analyze various related literature and policy documents, providing an overview of the historical evolution of basic education management from pre-modern times to the contemporary era. The results illustrate the complexities and challenges in policy planning, implementation and evaluation, as well as the importance of effective supervision. It is hoped that this in-depth understanding can improve the effectiveness of basic education policy and management globally.

Keywords: Nature, Management Policy, Basic Education

Abstrak. Pendidikan dasar merupakan fase kritis dalam pembentukan fondasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai bagi setiap individu. Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar menjadi poin sentral dalam upaya memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata. Artikel ini mengeksplorasi hakekat kebijakan pengelolaan pendidikan dasar, mulai dari landasan filosofis hingga proses implementasi. Metode studi perpustakaan digunakan untuk menganalisis berbagai literatur dan dokumen kebijakan terkait, memberikan gambaran evolusi sejarah pengelolaan pendidikan dasar dari masa pra-modern hingga era kontemporer. Hasil penelitian menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, serta pentingnya pengawasan yang efektif. Diharapkan pemahaman yang mendalam ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar secara global.

Kata kunci: Hakikat, Kebijakan Pengelolaan, Pendidikan Dasar

LATAR BELAKANG

Pendidikan dasar merupakan fase kritis dalam pembentukan fondasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai bagi setiap individu. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar menjadi poin sentral dalam upaya memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang hakekat kebijakan pengelolaan sangatlah penting. Pertama-tama, hakekat tersebut mencakup pemahaman terhadap landasan filosofis dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pembentukan kebijakan pendidikan dasar. Hal ini meliputi pandangan tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pendidikan.

Selain itu, pemahaman tentang hakekat kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar juga mencakup pengetahuan mendalam tentang proses pembuatan kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Pemahaman ini akan membantu

dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, hakekat kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga mencakup aspek teknis seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Perencanaan yang matang dan berbasis data akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, dan peluang dalam pengelolaan pendidikan dasar. Selain itu, pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, serta dukungan yang memadai dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur.

Tidak hanya itu, hakekat kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar juga mencakup aspek pengawasan dan pemantauan. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta menindaklanjuti jika terdapat masalah atau ketidaksesuaian dalam implementasinya. Selain itu, pemantauan yang berkelanjutan akan membantu dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar serta identifikasi perubahan yang diperlukan dalam pengelolaannya.

Terakhir, pemahaman tentang hakekat kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga mencakup penghargaan terhadap konteks sosial, budaya, dan politik dalam setiap kebijakan yang dibuat. Setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam pengelolaan pendidikan dasar, oleh karena itu, kebijakan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas lokal. Hal ini akan membantu dalam menciptakan kebijakan yang relevan, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan dasar. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hakekat kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar merupakan landasan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dasar di seluruh dunia.

Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai hakekat kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar. Kami akan mengeksplorasi pentingnya memahami berbagai dimensi kebijakan tersebut, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat membantu meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar secara keseluruhan. Dengan memahami hakekat kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar, diharapkan kita dapat lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang berdampak positif bagi perkembangan pendidikan dasar di masa depan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode studi perpustakaan (library research) untuk menyelidiki hakekat kebijakan pengelolaan satuan pendidikan dasar[1]. Langkah awal penelitian melibatkan identifikasi dan pengumpulan berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku tentang kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan dasar, dan landasan filosofis pendidikan[2]. Selain itu, jurnal-jurnal akademik yang membahas proses pembuatan kebijakan dan evaluasi kebijakan pendidikan dasar juga menjadi fokus utama dalam mengumpulkan informasi. Artikel dan makalah dari konferensi terkait pendidikan dasar digunakan untuk melengkapi perspektif dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis dokumen kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah serta laporan penelitian terdahulu yang membahas aspek-aspek teknis dan evaluasi kebijakan pendidikan dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan di Pendidikan Dasar

Sejarah pengelolaan pendidikan dasar melibatkan evolusi sistem pendidikan dari masa ke masa, dari pendekatan yang sederhana hingga yang lebih kompleks, dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi masyarakat. Berikut adalah gambaran umum mengenai perkembangan sejarah pengelolaan pendidikan dasar:

1. Masa Pra-Modern

Sebelum adanya sistem pendidikan formal, pendidikan dasar lebih bersifat informal dan didominasi oleh pembelajaran di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Di banyak masyarakat, pengetahuan dan keterampilan diajarkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan agama, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada waktu itu.

2. Era Awal Modern: Pada awal era modern, terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan pendidikan dasar. Di banyak negara Eropa, gereja dan pemerintah lokal mulai mengatur sistem pendidikan dasar. Sekolah-sekolah dibangun dan kurikulum standar diperkenalkan. Periode ini ditandai dengan gerakan pendidikan yang lebih terstruktur dan sering kali dipengaruhi oleh filosofi pendidikan dari tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau.

3. Periode Kolonial: Di banyak wilayah yang menjadi jajahan kolonial, sistem pendidikan dasar sering kali digunakan untuk memperkuat kekuasaan kolonial. Pendidikan diberikan dengan tujuan untuk menghasilkan warga yang taat dan patuh terhadap penguasa kolonial. Kurikulum sering kali didesain untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kolonial kepada generasi muda.
4. Era Pasca-Kolonial: Setelah periode kemerdekaan, banyak negara yang dulunya dijajah melakukan reformasi dalam pengelolaan pendidikan dasar. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan pendidikan yang berpusat pada pembebasan (seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire) menjadi populer dalam upaya menciptakan pendidikan yang memperkuat identitas nasional dan memerangi ketidaksetaraan sosial.
5. Era Kontemporer: Di era globalisasi saat ini, pengelolaan pendidikan dasar semakin kompleks dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global. Pendekatan pendidikan berbasis teknologi, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan keterampilan abad ke-21 menjadi fokus dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan dasar di berbagai negara.

Sejarah pengelolaan pendidikan dasar mencerminkan upaya manusia untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan pendidikan dari masa ke masa. Dalam evolusinya, pendidikan dasar terus berubah dan berkembang, mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

B. Hakikat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Hakikat Pengelolaan dalam Pendidikan Dasar merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan sistem pendidikan dasar. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aspek pendidikan dasar, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang

meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan [3].

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri dalam aspek spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar Pengelolaan Pendidikan adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan agar tercapai efisiensi dan efektivitas (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Standar ini merujuk pada Permen No. 19 Tahun 2007, yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi pengelolaan (Annisa, 2017)[4].

Pengelolaan pendidikan melibatkan penerapan kaidah-kaidah administrasi dalam pendidikan secara terencana dan sistematis, untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas [5], [6]. Penyelenggaraan pendidikan melibatkan pelaksanaan komponen sistem pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kekuatan pengelolaan Pendidikan mampu mengendalikan dan mewujudkan efisiensi serta efektivitas sekolah. Pengelolaan yang baik dapat membawa sekolah menuju pencapaian yang lebih baik, sedangkan pengelolaan yang buruk menyebabkan stagnasi dalam mencapai visi dan misi sekolah[7].

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan berupa proses, cara, mengelola yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Hakikat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Berdasarkan pasal 17 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa :

1. Pendidikan dasar adalah jenjang yang menjadi dasar bagi Pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang setara.
3. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan tambahan yang menyebutkan bahwa program yang setara dengan SD/MI termasuk Paket B dalam Pendidikan Nono formal.

Prinsip Dasar Pendidikan Dasar adalah keyakinan utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dasar, mencakup SD dan SMP. Prinsip ini terkait dengan Landasan Pendidikan, yang membantu merinci dan mengembangkan prinsip tersebut menjadi dasar pemikiran dan tindakan yang solid. Faktor-faktor penyelenggaraan Pendidikan dasar terbagi menjadi dua kelompok.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti jenjang Pendidikan menengah dengan di bekali pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dasar.

D. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan Dasar

Menurut Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan:

1. Perencanaan Program
2. Pelaksanaan Program
3. Pengawasan dan evaluasi program
4. Kepemimpinan sekolah
5. Sistem informasi pengelolaan
6. Penilaian khusus

Dalam pengelolaan ini membutuhkan dalam pelaksanaan semua fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling)[8].

Adapun Ruang lingkup dari pengelolaan Pendidikan menurut (Sianturi et al., 2022), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan kurikulum

Pengelolaan Kurikulum meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi, kegiatan tentang pendataan mata pelajaran/mata kuliah yang diajarkan, waktu yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan kegiatan belajar mengajar, buku-buku yang dibutuhkan, promosi, evaluasi, prota, kalender pendidikan, perubahan kurikulum, maupun inovasi-inovasi dalam pengembangan kurikulum.

b. Pengelolaan peserta didik

Pengelolaan peserta didik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan penggalangan penerimaan

siswa baru ,pelaksanaan tes penerimaan siswa baru, penempatan dan pembagian kelas, kegiatan-kegiatan kesiswaan, motivasi dan upaya peningkatan kualitas lulusan dan sebagainya.

c. Pengelolaan Tenaga Pendidik atau Kepegawaian

Pengelolaan Tenaga Pendidik atau Kepegawaian meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan penerimaan pegawai baru, mutasi, surat keputusan, Surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, daftar umum kepegawaian, upaya peningkatan SDM serta kinerja pegawai dan sebagainya.

d. Pengelolaan Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi masuk dan keluarnya dana, usaha-usaha menggali sumber pendanaan sekolah seperti kegiatan koperasi serta penggunaan dana efisien

e. Pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang, pembagian dan penggunaan barang (inventaris), perbaikan barang, tukar- tambah maupun penghapusan barang

f. Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan kantor agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang yang membutuhkan serta berhubungan dengan kegiatan lembaga.

g. Pengelolaan Hubungan Dengan Masyarakat

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat misalnya pendataan alamat kantor atau orang yang dianggap perlu ,hasil kerjasama, program-program humas.

h. Unit Penunjang Pendidikan

Melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan seperti bimbingan konseling, perpustakaan, UKS, Pramuka, olahraga, dan kesenian.

i. Ekstrakurikuler

Proses terorganisir untuk kegiatan di luar kelas dan jam pelajaran guna mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam ilmu pengetahuan maupun bakat pribadi, melalui kegiatan wajib dan pilihan.

j. Layanan Khusus Pendidikan

Meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan khusus seperti makanan, antar jemput, dan bimbingan khusus di rumah.

k. Tata Lingkungan dan Keamanan Sekolah

Mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tata ruang, pertamanan, kebersihan, ketertiban, serta keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah[9].

E. Fungsi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

1. Fungsi Pengelolaan Pendidikan

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi Pengelolaan/administrasi pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan (Primasari, 2021):

a. Perencanaan (Planing)

Perencanaan adalah Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.

c. Pengarahan (Directing)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masingmasing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benarbenar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

e. Pengembangan Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

2. Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (PP Nomor Tahun 2010)

- a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur
- b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air
- c. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung.
- d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni
- f. Menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani
- g. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.

F. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Pendidikan Dasar

Tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan dasar memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut adalah tujuan dan manfaat utama dari manajemen pengelolaan pendidikan dasar.

Tujuan Pengelolaan Pendidikan Dasar Sebagai Berikut:

- a. Efektivitas Operasional: Memastikan operasional sekolah berjalan dengan efisien dan efektif, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.
- b. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran: Mengoptimalkan proses pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.
- c. Mendorong Inovasi: Mendorong inovasi dalam pendidikan dasar melalui pengembangan dan implementasi metode pembelajaran yang baru dan efektif.
- d. Peningkatan Kepemimpinan: Mengembangkan kepemimpinan yang efektif di tingkat manajerial dan akademik untuk mendukung pengelolaan pendidikan dasar yang berkualitas.
- e. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran, kinerja siswa, dan kualitas pengajaran untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan.

- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengembangkan kompetensi dan keterampilan staf pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya, melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

Manfaat Pengelolaan Pendidikan Dasar Sebagai Berikut :

- a. Peningkatan Prestasi Akademik: Manajemen yang baik dapat meningkatkan prestasi akademik siswa melalui penggunaan strategi pembelajaran yang efektif dan dukungan yang tepat bagi guru.
- b. Optimalisasi Sumber Daya: Membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
- c. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder: Manajemen yang efektif dapat meningkatkan kepuasan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat.
- d. Penyediaan Lingkungan Pembelajaran yang Berkualitas: Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung, yang mendorong partisipasi aktif dan kreativitas siswa.
- e. Peningkatan Daya Saing: Meningkatkan daya saing lulusan dalam pasar kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan.
- f. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional: Manajemen pengelolaan pendidikan dasar yang baik berkontribusi pada pembangunan nasional dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi untuk menjadi motor pembangunan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan dasar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

G. Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar merujuk pada serangkaian keputusan dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan berbagai aspek pendidikan dasar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dasar bagi semua anak.

Berikut adalah beberapa kebijakan yang umumnya terkait dengan pengelolaan pendidikan dasar:

- a. Kebijakan Kurikulum: Merupakan kebijakan yang menetapkan standar kurikulum nasional atau daerah yang mencakup mata pelajaran, metode pembelajaran, dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa pada setiap tingkatan pendidikan dasar.
- b. Kebijakan Penilaian dan Evaluasi: Merupakan kebijakan yang menetapkan sistem penilaian dan evaluasi untuk mengukur pencapaian siswa, kinerja sekolah, dan efektivitas program pembelajaran. Ini termasuk kebijakan terkait ujian nasional, ujian sekolah, dan penilaian formatif dan sumatif lainnya.
- c. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Merupakan kebijakan yang menetapkan standar dan program pelatihan serta pengembangan profesional untuk guru dan tenaga pendidik lainnya, termasuk pengembangan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan pemberian insentif.
- d. Kebijakan Pengelolaan Sekolah: Merupakan kebijakan yang mengatur tata kelola sekolah, termasuk pemilihan kepala sekolah, manajemen keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah.
- e. Kebijakan Inklusi dan Keterlibatan Masyarakat: Merupakan kebijakan yang mendorong inklusi siswa dengan kebutuhan khusus dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendidikan, termasuk pembentukan komite sekolah, program kesetaraan, dan dukungan bagi anak-anak yang rentan.
- f. Kebijakan Peningkatan Akses dan Kesetaraan: Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar bagi semua anak, termasuk anak-anak dari kelompok marginal, daerah terpencil, dan keluarga berpenghasilan rendah.
- g. Kebijakan Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan: Merupakan kebijakan yang mengatur integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, termasuk pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran digital.
- h. Kebijakan Penanganan Krisis dan Darurat: Merupakan kebijakan yang menetapkan langkah-langkah darurat dan strategi penanganan krisis, seperti pandemi atau bencana alam, yang dapat memengaruhi kontinuitas pendidikan dasar.

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas, yang mendukung perkembangan holistik setiap anak. Oleh karena itu, perumusan, implementasi, dan

evaluasi kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah pengelolaan pendidikan dasar menunjukkan evolusi sistem pendidikan dari era pra-modern yang informal hingga era kontemporer yang kompleks dan berbasis teknologi. Pengelolaan pendidikan dasar melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 mengatur standar dan kebijakan pengelolaan pendidikan, mencakup kurikulum, tenaga pendidik, keuangan, sarana prasarana, dan hubungan dengan masyarakat. Fungsi pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan, sementara tujuan utama pengelolaan pendidikan dasar adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas operasional, inovasi, kepemimpinan, serta pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas untuk perkembangan holistik peserta didik.

Demikian artikel yang dibuat, semoga dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca. Sebagai penyusun kami menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan artikel yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Di, P., & Pesisir, W. (2017). Annisa, M. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Mengacu Standar Nasional Pendidikan di Wilayah Pesisir. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(4), 210-216. <https://doi.org/10.23887/jere.v1i4.12097>
- Handoko, G., Saepudin, A., & Barlian, U. C. (2022). Handoko, G., Saepudin, A., & Barlian, U. C. Standar Pengelolaan dalam Mewujudkan Sekolah yang Efektif (Analisis Deskriptif di SMA Negeri 8 Jakarta). *Eduvis: Jurnal Pengelolaan Pendidikan Islam*, 7(1), 37–46.
- Haq, M. F. (2017). ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Volume 1, Issue 1, 26–41.
- Kecamatan, D., & Kabupaten, N. (2015). Rahayu, M. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1), 62–79. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4929>
- Nelani Khairun, Dodi Pasila Putra, Neliwarti Neliwarti, & Andy Riski Pratama. (2023). Pusat

Informasi dan Konseling Remaja Spansatika ok sebagai Wadah Pembentukan Konselor Sebaya yang Mampu Menerapkan Konseling Sebaya di SMP Negeri 1 Tilatang Kamang. *Education Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 01-11. <https://doi.org/10.51903/education.v4i1.448>

Pratama, A. R. (2023). Implementasi Metode Brainstorming Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kelas XI SMA Negeri 4 Bukittinggi. *Madinah Journal of Islamic Studies*, 10(1), 120–130. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1496>

Pratama, A. R., & Saputra, A. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi. Volume 3, Issue 1.

Sianturi, R., Aini, N., Surya, K. S., & Khaerunnisa, G. (2022). Sianturi, R., Aini, N., Surya, K. S., & Khaerunnisa, G. Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 54–64. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/YaaBunayya/article/view/14392/7809>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.